

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**Demerintah Kota Bogor
Kecamatan Tanah Sareal
Jl. Kebon Dedes No. 20
Telp. (0251) 8328547
Bogor 16162**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kinerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka mencapai visi, misi, dan mewujudkan *good governance*, maka disusunlah Laporan Kinerja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2019.

Laporan ini berisi tentang Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Tahunan, Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanah Sareal sesuai dengan tugas pokok, fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Maret 2020



R. Asep Kartiwa, SE

NIP. 19670405 198703 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Dasar Hukum	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	7
2.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja	8
a. Tujuan dan indikator kinerja tujuan.....	8
b. Sasaran dan indikator kinerja sasaran.....	8
c. Program dan indikator kinerja program.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	
3.1 Pengukuran Kinerja	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
BAB IV : PENUTUP	23

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Revisi RENSTRA 2015-2019

Lampiran 2. IKU Tahun 2019

Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2019

Lampiran 4. Monev Rencana Aksi Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Luas wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebesar 1.970 Ha yang terdiri dari 11 Kelurahan, 135 RW, 669 RT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bogor Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bogor Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bogor Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas baik administrasi maupun operasional kecamatan didukung oleh Sekretariat Kecamatan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pengendalian Pembangunan, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Ekonomi, Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Lurah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana point di atas kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan

c. Penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
6. membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan
8. pengkoordinasian para Lurah di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun uraian tugas dari Sekretariat, Sub Bagian, Seksi dan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesekretariatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan
 - c. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan
 - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian
 - b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan
 - c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pelayanan di bidang keuangan
 - d. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan
 - e. Perencanaan rencana kerja lingkup kecamatan
 - f. Pengelolaan administrasi kegiatan perencanaan dan pelaporan
 - g. Pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi
 - h. Penyusunan laporan kegiatan lingkup kecamatan

4. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pemerintahan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan

5. **Seksi Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pengendalian Pembangunan dan mempunyai fungsi :**
 - a. **Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengendalian Pembangunan**
 - b. **Pelaksanaan fasilitas dan program kerja di bidang Pengendalian Pembangunan**
 - c. **Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan**
 - d. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pembangunan**

6. **Seksi Kemasyarakatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Kemasyarakatan dan mempunyai fungsi :**
 - a. **Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kemasyarakatan**
 - b. **Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang Kemasyarakatan**
 - c. **Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kemasyarakatan**
 - d. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemasyarakatan**

7. **Seksi Ekonomi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Perekonomian dan mempunyai fungsi :**
 - a. **Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ekonomi**
 - b. **Pelaksanaan fasilitas musyawarah bidang ekonomi**
 - c. **Penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi tingkat Kecamatan**
 - d. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ekonomi**

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban
- b. Penyusunan kegiatan dan administrasi penertiban, penegakan hukum dan pembinaan keamanan di wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perekonomian

10. Lurah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kelurahan
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang dikoordinasikan melalui Camat
- c. Fasilitasi tugas-tugas dinas dan lembaga teknis yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Lurah dibantu oleh Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Lurah ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- 14) Keputusan Walikota Bogor Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
- 15) Keputusan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2002 Tentang Pedoman Ketatalaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah suatu penetapan kegiatan dalam menentukan tindakan untuk masa depan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan citra yang ingin diwujudkan agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, dan berdasarkan harapan yang diinginkan masyarakat Kota Bogor. Dalam mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanah Sareal memiliki visi sebagai berikut :

"KECAMATAN YANG BERSAHABAT, PROFESIONAL, TRANSPARAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen baik masyarakat maupun aparat di wilayah Kecamatan Tanah Sareal untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat serta lancarnya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi di atas, Kecamatan Tanah Sareal mempunyai misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana pendukung dan kepatuhan hukum.

Misi ini mengandung makna bahwa arah pembangunan di Kecamatan Tanah Sareal akan diarahkan kepada peningkatan kualitas pegawai melalui bintek atau pelatihan agar menjadi ahli pada bidangnya (profesional) serta kepatuhan akan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas.

Misi 2 : Mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Misi ini memberikan makna bahwa peran partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan akan lebih dioptimalkan lagi sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna bagi ke maslahatan masyarakat luas.

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan transparan berbasis teknologi informasi.

Misi ini mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan diarahkan kepada profesionalitas aparatur dengan penerpan prinsip-prinsip clean government dan good governance sehingga mampu memberikan pelayanan prima, akuntabel, inovatif dan transparan.

2.2 Tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja

a. Tujuan dan indikator kinerja tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan indikator kinerja tujuan yang akan dicapai untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan	1	Persentase pelayanan aparatur terhadap kepuasan masyarakat	80%

b. Sasaran dan indikator kinerja sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi musrembang kecamatan	86%
		Tingkat partisipasi musrembang kelurahan	62%
2	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (baik)
		Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100%
4	Meningkatnya ketertiban wilayah	Persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB	100%
		Persentase PKL yang menempati zona terlarang	70%

c. Program dan indikator kinerja program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
Tahun 2019 Kecamatan Tanah Sareal mendapatkan anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp. 17.464.354.796,- sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.640.143.000,- untuk pelaksanaan 52 (lima puluh dua) kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Inventaris Kantor	400.000.000
2	Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	394.000.000
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	343.500.000
	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100.950.000
5	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan / Kelurahan melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2017 Kelurahan Tanah Sareal	250.000.000
6	Lomba Kinerja Aparatur	48.310.000
7	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan / Kelurahan melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kebon Pedes	200.000.000
8	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal	275.480.000
9	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes	416.850.000
10	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak	512.850.000
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya	277.200.000
12	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin	416.600.000
13	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai	345.800.000
14	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaesmi	260.800.000
15	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak	442.050.000
16	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi	425.110.000

17	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana	427.160.000
18	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis	363.820.000
	UMUM	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	719.615.000
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal	125.000.000
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes	125.000.000
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak	125.000.000
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya	125.000.000
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin	125.000.000
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai	125.000.000
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi	125.000.000
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak	125.000.000
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi	125.000.000
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana	125.000.000
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayumanis	126.930.000
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal	370.138.000
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes	370.138.000
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak	370.138.000
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya	370.138.000

35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin	370.138.000
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai	370.138.000
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaremi	370.138.000
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak	370.138.000
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi	370.138.000
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana	370.138.000
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis	370.138.000
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
42	Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	13.200.000
	SOSIAL	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
43	Penanggulangan/penanganan Darurat Bencana	50.000.000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	
44	Penanganan Mayat Terlantar	25.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial	
45	Seleksi Tilawatil Quran	112.500.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	
46	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)	248.250.000
	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	

47	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	51.600.000
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
48	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	20.300.000
	PENANAMAN MODAL	
	Program Peningkatan Daya saing Penanaman Modal	
49	Pelayanan Perijinan IMB Tingkat Kecamatan	15.050.000
	PERENCANAAN	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
50	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	15.500.000
	KEUANGAN	
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	
51	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	11.600.000
52	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	8.600.000
	Jumlah	12.640.143.000

2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanah Sareal yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.

Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Camat Tanah Sareal oleh Walikota Bogor. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi musrembang kecamatan	86%	100
		Tingkat partisipasi musrembang keurahan	62%	100
2	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (baik)	B
		Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu	100%	80,46
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	99,39
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100%	95
4	Meningkatnya ketertiban wilayah	Persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB	100%	88,04
		Persentase PKL yang menempati zona terlarang	70%	60

Realisasi pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Kegiatan Tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Inventaris Kantor	400.000.000	367.165.500	91,79
2	Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	394.000.000	362.132.140	91,91
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	343.500.000	337.018.887	98,11
	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan			
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100.950.000	95.805.000	94,90
5	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan / Kelurahan melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2017 Kelurahan Tanah Sareal	250.000.000	188.564.000	75,43
6	Lomba Kinerja Aparatur	48.310.000	42.009.000	86,96
7	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan / Kelurahan melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kebon Pedes	200.000.000	191.621.200	95,81
8	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal	275.480.000	257.418.947	93,44
9	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes	416.850.000	406.582.500	97,54
10	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak	512.850.000	512.564.000	99,94
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya	277.200.000	276.431.000	99,72
12	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin	416.600.000	409.277.500	98,24
13	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai	345.800.000	339.268.700	98,11

14	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi	260.800.000	252.550.000	96,84
15	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak	442.050.000	431.377.500	97,59
16	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi	425.110.000	407.067.000	95,76
17	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana	427.160.000	425.650.000	99,65
18	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis	363.820.000	350.968.500	96,47
	UMUM			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	719.615.000	662.160.757	92,02
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal	125.000.000	115.058.525	92,05
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes	125.000.000	123.754.530	99,00
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak	125.000.000	123.650.600	98,92
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya	125.000.000	123.593.000	98,87
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin	125.000.000	123.884.350	99,11
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai	125.000.000	124.593.000	99,67
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi	125.000.000	124.280.000	99,42
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak	125.000.000	124.611.905	99,69
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi	125.000.000	122.750.000	98,20
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana	125.000.000	122.454.500	97,96
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayumanis	126.930.000	123.324.000	97,16
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan	370.138.000	362.379.826	97,90

	Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal			
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes	370.138.000	362.929.190	98,05
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak	370.138.000	358.526.620	96,86
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya	370.138.000	354.134.945	95,68
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin	370.138.000	358.283.982	96,80
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai	370.138.000	274.196.200	74,08
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaresmi	370.138.000	360.238.927	97,33
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak	370.138.000	343.868.979	92,90
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi	370.138.000	362.975.330	98,06
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana	370.138.000	362.642.947	97,98
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis	370.138.000	368.006.185	99,42
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
42	Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	13.200.000	9.050.000	68,56
	SOSIAL			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
43	Penanggulangan/penanganan Darurat Bencana	50.000.000	19.001.000	38,00

	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya			
44	Penanganan Mayat Terlantar	25.000.000	-	0,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial			
45	Seleksi Tilawatil Quran	112.500.000	111.685.000	99,28
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan			
46	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)	248.250.000	244.928.500	98,66
	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa			
47	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	51.600.000	51.600.000	100,00
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
48	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	20.300.000	950.000	4,68
	PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Daya saing Penanaman Modal			
49	Pelayanan Perijinan IMB Tingkat Kecamatan	15.050.000	13.250.000	88,04
	PERENCANAAN			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
50	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	15.500.000	15.500.000	100,00
	KEUANGAN			
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja			

	Keuangan			
51	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	11.600.000	9.800.000	84,48
52	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	8.600.000	8.600.000	100,00
	Jumlah	12.640.143.000	12.020.134.172	95,09

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019, sebagai berikut :

A. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, rata-rata persentase tingkat partisipasi musrembang kecamatan dan kelurahan sebesar 100% dengan terakomodirnya rencana pembangunan diwilayah sesuai aspirasi masyarakat dan terlaksananya kegiatan musrembang tingkat kecamatan yang merupakan bentuk dari tingkat partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan di wilayah kecamatan. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi musrembang kecamatan	86%	100%	99,70%	0,3%
		Tingkat partisipasi musrembang kelurahan	62%	100%	99,70%	0,3%

B. Sasaran meningkatnya pelayanan publik di kecamatan, rata-rata persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) tepat waktu sebesar 80,46% dan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai B (baik) melalui :

- a. Program kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal;
- c. Program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kecejahteraan sosial lainnya;
- d. Program pemberdayaan lembaga sosial;

- e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan;
- f. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- g. Program peningkatan daya saing penanaman modal;
- h. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	B	B	B	
		Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) tepat waktu	100%	80,46%	80%	0,46%

C. **Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**, rata-rata persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 99,39% dan nilai akuntabilitas kinerja kecamatan sebesar 95% sesuai program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pelayanan administrasi perkantoran, program pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	94,51%	99,39%	-4,88%
		Nilai akuntabilitas kinerja kecamatan	100%	95%	95%	

D. **Sasaran meningkatnya ketertiban wilayah** rata-rata persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB sebesar 88,04% dan persentase PKL yang menempati zona terlarang sebesar 60% dimana terlaksananya pelayanan perizinan yang terrealisasi sebanyak 45 izin IMB sehingga terciptanya tertib administrasi di masyarakat dan terlaksananya pelayanan perizinan. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya ketertiban wilayah	Persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB	100%	88,04%	95,71%	-7,67%
		Persentase PKL yang menempati zona terlarang	70%	60%	60%	

BAB IV

PENUTUP

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disamping merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja suatu instansi juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja individu atau Pejabat Publik didalam melaksanakan mandat yang ditugaskannya.

Dengan demikian apabila suatu tuntutan akuntabilitas telah dipenuhi dan diakui keberadaannya, maka kepercayaan terhadap pejabat di instansi tersebut akan meningkat karena tugas dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik sehingga tujuan akhir yang diharapkan untuk terciptanya ke Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dapat dicapai.

LAMPIRAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TANTUAN AWAL PERENCANAAN	TABEL 1		TABEL 2		TABEL 3		TABEL 4		TABEL 5			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sereal	100%	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	319.200.000	100%	470.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes	100%	100%	337.400.000	100%	347.400.000	100%	347.400.000	100%	484.800.000	100%	635.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebong Badak	100%	100%	421.600.000	100%	421.600.000	100%	421.600.000	100%	579.600.000	100%	730.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebong Jaya	100%	100%	238.200.000	100%	238.200.000	100%	238.200.000	100%	345.600.000	100%	496.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebong Wangin	100%	100%	354.000.000	100%	348.035.600	100%	348.035.600	100%	484.035.600	100%	636.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Suladama	100%	100%	286.400.000	100%	286.400.000	100%	286.400.000	100%	414.000.000	100%	564.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak	100%	100%	348.400.000	100%	347.530.000	100%	347.530.000	100%	494.330.000	100%	635.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwang	100%	100%	332.000.000	100%	321.600.000	100%	321.600.000	100%	464.400.000	100%	615.000.000		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana	100%	100%	319.400.000	100%	332.805.000	100%	332.805.000	100%	466.800.000	100%	617.000.000		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDUKATOR KEMERIA PROGRAM	KESIBATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TABEL 1			TABEL 2			TABEL 3			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Belanja Mess service, Belanja suku cadang pemeliharaan perlengkapan kantor, Pemeliharaan bangunan dll	Pembelian runtu/berkala inventaris kantor	12 Bulan	826.600.000	12 Bulan	540.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	400.000.000	
					Terpeertinya barang inventaris kantor	Pengadaan inventaris kantor	12 Bulan	1.714.077.000	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.545.000.000	12 Bulan	1.065.000.000	12 Bulan	400.000.000	
					terpeertinya ruang pelayanan kantor kebutuhan dan gelung kantor kelurahan yang representatif	Pembangunan dan pemeliharaan bidang pelayanan kantor kelurahan dan kantor kecamatan	10 kelurahan		100%	800.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.063.100.000	100%	1.600.000.000	
					Terpeertinya Pagar Kantor kelurahan: Kandang warangg, Kencana, Tanah Sireui, Mekarwangi	Pemasangan Kandang Kelurahan	4 kelurahan		100%	500.000.000							
					Terpeertinya Pembangunan Kantor Kelurahan: Makurwangi, Tanah Sireui, Kandang warangg, Subadireui	Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kelurahan	4 Kelurahan	1.708.891.500	100%								
					terpeertinya wallpaper ruang pelayanan kantor kecamatan	Pembuatan Wallpaper Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Sireui		75.000.000	100%								
					terpeertinya rolling door dan canopy di kantor kecamatan tanah sireui	Pembangunan Rollingdoor dan Canopy Kantor Kecamatan Tanah Sireui		135.000.000	100%								

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR-KEMERIA PROGRAM	KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Susoharjo		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kojoraban Cibadak		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kemata		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayubadus		100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	150.000.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi				100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000		
				Program peningkatan kemampuan teknis dan pengetahuan tingkat terminal	Terkendalinya pertumbuhan PKL dan Terusmnya data PKL	Pelatihan PKL di jalan lingkungan		100%		100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000				
						Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat										100%	30.000.000		
								6.899.362.760			10.174.900.000		11.469.265.600		10.277.000.000		12.750.000.000		



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR**

1. Tugas
2. Fungsi
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
 - f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

: Melaksanakan sebagian urusan di bidang pemerintahan.

3. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Setusan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Uraian Indikator Kinerja Utama	Formula				
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan	$\frac{\text{Undangan yang hadir}}{\text{Total undangan}} \times 100\%$	%	Daftar Hadir Musrenbang	Kasi Pengendalian Pembangunan	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik	$\frac{\text{Hasil Kuisioner Yang Diterima}}{\text{Total Kuisioner Yang Disebar}} \times 100\%$	%	Kuisioner	Kasi Pemerintahan	
3.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	$\frac{\text{Jumlah Luas Pemukiman Kumuh Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Luas Pemukiman Kumuh Yang Telah Ditetapkan}} \times 100\%$	%	Data Pemukiman Kumuh	Kasi Kemasyarakatan	



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN TANAH SARIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG		KINERJA BERKALA				KINERJA AKHIR TAHUN 2019		PERANGGANG JAWAB	KEPERANGKUN					
				PROGAM	KEGIATAN	TRIMESTER	KINERJA	TAMBAH ANGGARAN	KONTRAK	ANGGARAN								
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan	80%	Peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat	I	100%	15.800.000	1 kali pelaksanaan monitoring	15.500.000	Kasi Peningkatan Pembangunan	APBD						
						II												
						III												
						IV												
2	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	9 (satu)	Peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan pelayanan masyarakat	I	25%	17.800.000	12 Akhlaq Laporan hasil penelitian dan 4 akhlaq laporan monitoring kesehatan	51.600.000	Korbid Kesehatan, Perencanaan dan Pelayanan	APBD						
						II	50%	15.450.000										
						III	75%	11.250.000										
						IV	100%	7.050.000										
						100%	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan					100%	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	I	25%	3.300.000
																II	50%	3.300.000
																III	75%	3.300.000
																IV	100%	3.300.000
						100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan					100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	I	3 Mayor	7.500.000
																II	6 Mayor	7.500.000
																III	7.500.000	
																IV	2.500.000	
100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	I	3 Malukan	15.000.000										
						II	4 Malukan	15.000.000										
						III	15.000.000											
						IV	5.000.000											
100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	I	31 Kabupaten	112.500.000										
						II	1 Labuai	27.500.000										
						III	2 Labuai	87.000.000										
						IV												
100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	100%	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan	I	2 Labuai	91.600.000										
						II	2 Labuai	43.900.000										
						III												
						IV												

